



**IMPLEMENTASI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL TENTANG KEBEBASAN BERKESPRESI (STUDI
KASUS JAFAR PANAHİ DI IRAN)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana
(S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:
LITANI TESALONIKA RISTY

B2A 008 133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

ABSTRAK

Kebebasan berkespresi merupakan HAM yang diakui Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan cara apa pun dan melalui media apa pun. Meskipun prinsip HAM kebebasan berekspresi telah diakui secara internasional, beberapa negara masih membatasi dengan ketat pelaksanaan hak tersebut. Penulisan hukum ini hendak membahas dua rumusan masalah, yakni (1) Eksistensi hak kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan (2) Implementasi hak kebebasan berkespresi tersebut dalam kasus Jafar Panahi di Iran.

Rumusan Masalah tersebut diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis. Penulisan ini mengutamakan data kepustakaan instrumen hukum internasional yang bertahan hidup di sana.

Selain terdapat di dalam UDHR, prinsip kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Pasal 5 ayat d poin (viii) ICERD 1965, Pasal 19 ICCPR 1966, Pasal 1 CEDAW 1979, Pasal 13 ayat 1 UNCRC 1989, dan Pasal 1 poin (b) Prinsip Johannesburg 1995. Pemerintah Iran meratifikasi ICCPR dan sebagai anggota PBB terikat secara moral dengan ketentuan dalam UDHR, namun penerapan prinsip kebebasan berekspresi belum terlaksana dengan baik di Iran, karena penangkapan Jafar Panahi tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi internasional maupun Undang-Undang negara bernaafaskan Islam yang berlaku di negara tersebut.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The freedom of expression is the right stated on Article 19 of *Universal Declaration of Human Rights*. It guarantees that everyone has the right to seek, to receive, and to import any information by any way and any media. Although the freedom of expression principle has been approved internationally, some countries still limit it strictly. This legal writing will discuss two formulations of problems, those are (1) the existence of the freedom of expression according to International Human Right Law perspective and (2) the implementation of the freedom of expression in Jafar Panahi's case in Iran.

The formulations of problems are studied by using normative juridical approach and analytic descriptive specification. In writing this thesis the writer mostly uses the data from library and international law instrument.

Besides stated on the UDHR, the freedom of expression's principle is stated on Article 5 paragraph d point (viii) ICERD 1965, Article 19 ICCPR 1966, Article 1 CEDAW 1979, Article 13 paragraph 1 UNCRC 1989, and Article 1 point (b) the Principle of Johannesburg 1995. The Iranian Government has ratify ICCPR. As the United Nations' member Iran is morally bounded by the provision stated on UDHR. However, the implementation of the freedom of expression in Iran has not manifested well yet. The arrest of Jafar Panahi is not suitable with either the international principle of the freedom of expression or Islamic law in Iran.

Keywords: Freedom of Expression, Human Rights